



#DINSOS
SELALU ADA



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan sebuah kerangka kerja berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun yaitu Tahun 2025-2029. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2025 s/d Tahun 2029. Renstra ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2025 - 2029.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan.

Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu “Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera”. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap Renstra ini memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kota Pekanbaru, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menyelesaikan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025 - 2029 ini.

PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN RENSTRA
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
B A B II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DINAS SOSIAL	11
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial	11
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL.....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STARETGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.....	35
3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029	36
3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029	38
3.4 Arah Kebijakan Dinas Sosial Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	40
BAB IV PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	42
4.1 Uraian Program.....	42
4.2 Uraian Kegiatan	43
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	46
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	91
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Pada Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	93
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	95
BAB V PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bagan Struktur Organisasi.....	17
Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Eselon	18
Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan.....	19
Tabel 2.3 Data Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Jenjang Pendidikan	20
Tabel 2.4 KIB A - (Tanah)	21
Tabel 2.5 KIB B - (Peralatan dan Mesin)	22
Tabel 2.6 KIB C - (Gedung dan Bangunan)	24
Tabel 2.7 KIB D - (Jalan, Jaringan dan Irigasi)	25
Tabel 2.8 KIB E - (Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	26
Tabel 2.9 KIB F - (Aset Tetap Lainnya).....	26
Tabel 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif ..	46
Tabel 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas	85
Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas	91
Tabel 4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra	94
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama	93
Tabel 4.8 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	95

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, sedang di Daerah RPJM Daerah. Penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan rancangan awal dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi semua SKPD, dalam menyusun Rencana Strategisnya (Renstra SKPD). Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai kedudukan sebagai pedoman arah dan pelayanan dalam pembangunan kesejahteraan sosial serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Alur pemikiran yang termaktub dalam Restra-SKPD harus tetap mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah. Penentuan tujuan dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pada Rencana

Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 serta norma, standar, prosedur yang ditetapkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, SKPD wajib untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD . RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RENSTRA Perangkat Daerah disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan didalam kehidupan masyarakat, maka perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan acuan rencana tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program, lokasi dan kegiatan

yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya rasa aman, yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sesuai dengan Permensos No. 3 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Sosial (Permensos) tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk bantuan sosial dan program kesejahteraan sosial.

Seperti yang kita ketahui bahwa Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 80 I HUK I 2010 dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dengan sumber daya lain akan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan regional. Unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini merupakan satu dokumen Perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan khususnya, Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun kedepan. Renstra ini dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua Stake Holder. Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk dituangkan ke dalam Rencana Tahunan, Renja, RKA dan APBD.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor sosial dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota Pekanbaru sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru di bentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok OPD - OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Rencana strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial selama kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan 2025 - 2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan
5. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
7. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
8. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
9. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
11. Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
12. Undang-undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin
13. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
15. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
16. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin
17. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
18. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
19. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang persyaratan pengangkatan anak
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009

21. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
27. Permensos No. 3 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Sosial (Permensos) tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk bantuan sosial dan program kesejahteraan sosial
28. Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029
30. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7)
31. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2025 - 2029 adalah sebagai dokumen perencanaan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan di Kota Pekanbaru yang berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

B. Tujuan

Sedangkan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja tahunan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
2. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Sebagai tolok ukur dalam menelaah capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025 - 2029 telah mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 yang secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru, keterkaitan Renstra Dinas Dinas Sosial dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan kaidah penyusunan penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan sistematika pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen ini memuat informasi mengenai peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diuraikan juga secara ringkas sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan layanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Selain itu, dokumen ini juga mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang relevan dengan konteks pembangunan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial selama periode Renstra sebelumnya, yang diukur berdasarkan target sasaran Renstra, indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, serta indikator Kinerja lainnya seperti indikator pelayanan Perangkat Daerah, Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan permasalahan pelayanan Dinas Sosial beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang ditinjau dari gambaran umum pelayanan, keselarasan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi maupun Kota terhadap penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, dijelaskan pula metode penentuan isu-isu strategis serta hasil identifikasi isu strategis yang menjadi fokus penanganan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada periode perencanaan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Visi Misi RPJMD Kota Pekanbaru 2025 - 2029

Subbab ini memuat visi dan misi RPJMD Kota Pekanbaru 2025-2029 yang menjadi acuan dalam merumuskan visi dan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada periode yang sama, sebagai landasan strategis dalam penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor Dinas Sosial.

3.2 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan sebagai arah umum yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Bagian ini menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, serta menjadi dasar dalam penetapan strategi, kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

3.3 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan, yang berfokus pada hasil spesifik yang ingin dicapai dalam kurun waktu perencanaan. Pada bagian ini setiap sasaran dirumuskan secara terukur dan disertai dengan indikator kinerja utama yang mencerminkan tingkat pencapaian keluaran (output) maupun hasil (outcome) yang diharapkan. Sasaran ini menjadi acuan dalam merumuskan kegiatan yang berorientasi pada hasil.

3.4 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada bagian ini disampaikan rumusan strategi Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai upaya sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029. Strategi ini mencerminkan respons terhadap permasalahan aktual serta potensi daerah dalam mendukung kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pada bagian ini diuraikan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025-2029. Arah kebijakan ini disusun untuk memastikan

konsistensi antara tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan Dinas Sosial secara efektif dan terukur.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG USAHA

4.1 Uraian Program

Pada bagian ini diuraikan program Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program-program ini mencerminkan fokus intervensi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial selama periode 2025-2029, dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan dan keterpaduan antar sektor.

4.2 Uraian Kegiatan

Pada bagian ini disampaikan uraian kegiatan sebagai implementasi langsung dari program yang telah ditetapkan, yang mencakup jenis kegiatan, output yang diharapkan, serta keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Setiap kegiatan dirancang untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan Dinas Sosial secara terukur dan berkelanjutan.

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Bagian ini memuat uraian subkegiatan yang mencakup kinerja, indikator, target tahunan, dan pagu indikatif sebagai dasar perencanaan, penganggaran, serta pengukuran akuntabilitas pelaksanaan perangkat daerah.

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat uraian subkegiatan yang disusun untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur, relevan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bagian ini memuat target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DINAS SOSIAL

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan, rehabilitasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial.

Pelayanan yang dilaksanakan mencakup penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, fakir miskin, korban bencana alam maupun bencana sosial, serta tuna sosial lainnya. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan aktif dalam pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan pekerja sosial masyarakat.

Melalui berbagai program dan kegiatan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan sosial. Pelayanan diberikan dengan prinsip cepat, tepat, dan berkeadilan, baik dalam bentuk bantuan sosial, pembinaan sosial, pendampingan, maupun pemberian akses terhadap layanan kesejahteraan sosial lainnya.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menjadi garda terdepan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi warga yang membutuhkan, sebagai wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial, termasuk penanganan korban bencana dan fakir miskin.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan:

Merumuskan kebijakan teknis dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Kebijakan:

Menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial untuk meningkatkan pelayanan publik.

3. Pembinaan dan Pengembangan:

Membina, mengembangkan, dan memberdayakan potensi serta sumber daya kesejahteraan sosial di masyarakat.

4. Pelayanan Sosial:

1. Rehabilitasi Sosial: Melaksanakan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana.
2. Pemberdayaan Sosial: Melakukan pemberdayaan individu, keluarga, masyarakat, serta penanganan fakir miskin.
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial: Memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan dan tidak mampu.

5. Penanganan Bencana:

Melakukan penanganan, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi korban bencana alam maupun konflik sosial.

6. Pengelolaan Data:

Mengumpulkan, mengelola, dan mengendalikan data PMKS dan PSKS untuk perencanaan dan penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.

7. Monitoring dan Evaluasi:

Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan program di bidang sosial untuk perbaikan kualitas pelayanan.

8. Koordinasi:

Mengelola dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 jenis, definisi dan kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial ada 26 PMKS yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana Karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang

diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 jenis, definisi dan kriteria Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ada 12 yaitu sebagai berikut:

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan social.
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
10. Penyuluh Sosial:
 - a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota, maka layanan dasar SPM Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar diluar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani PMKS dan PSKS yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan lainnya sert menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang sosial.
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

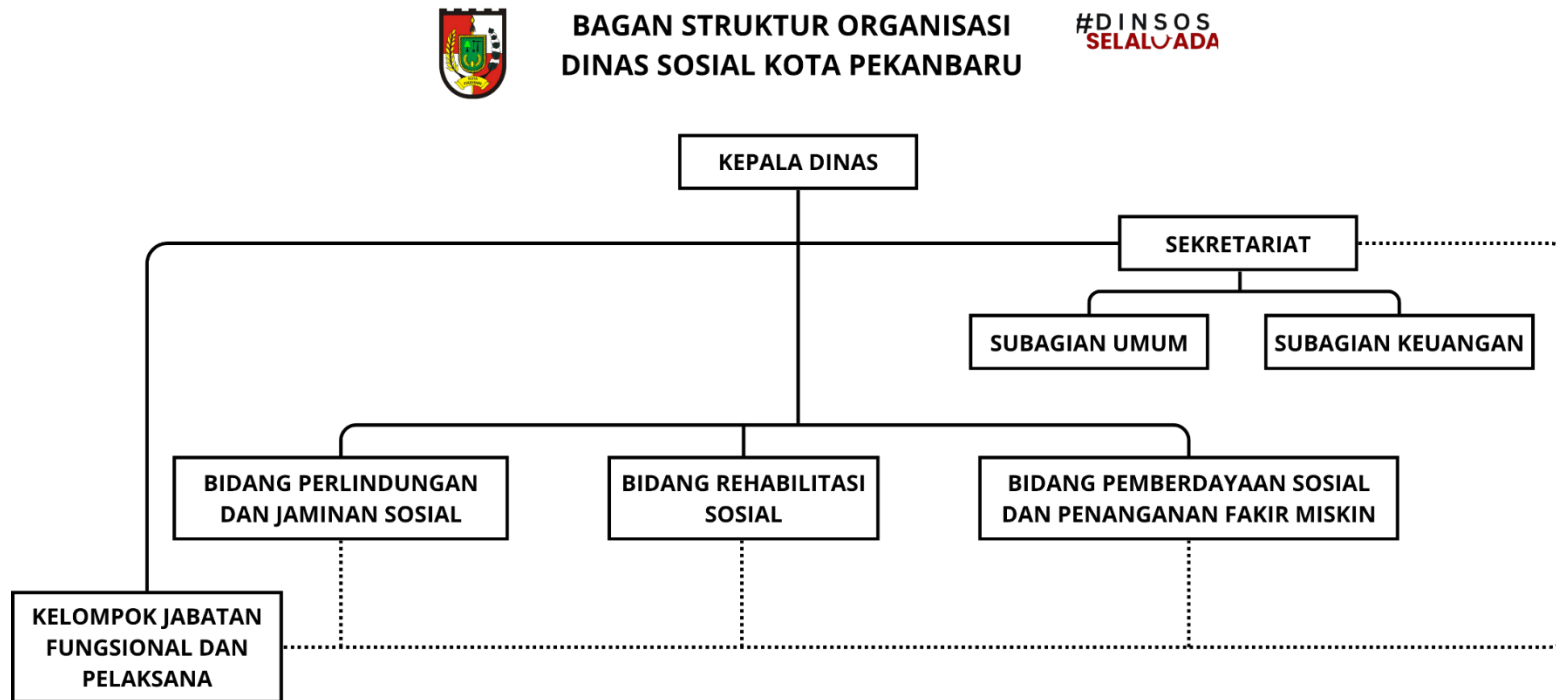
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
 - b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - a. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban.
 - e. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
dengan sub bagian
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- ## 3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin;
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
 - c. Sub Koordinator Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- ## 4. Bidang Rehabilitasi Sosial
- a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak;
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. Sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.
- ## 5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- a. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana;

- b. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial;
- c. Sub Koordinator Perlindungan dan Penyantunan Lanjut usia Terlan

Tabel 1.1.



Sesuai peraturan wali kota pekanbaru nomor 36 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah kota pekanbaru

B. Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan aset.

Keadaan pegawai dan aset pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru diuraikan sebagai berikut :

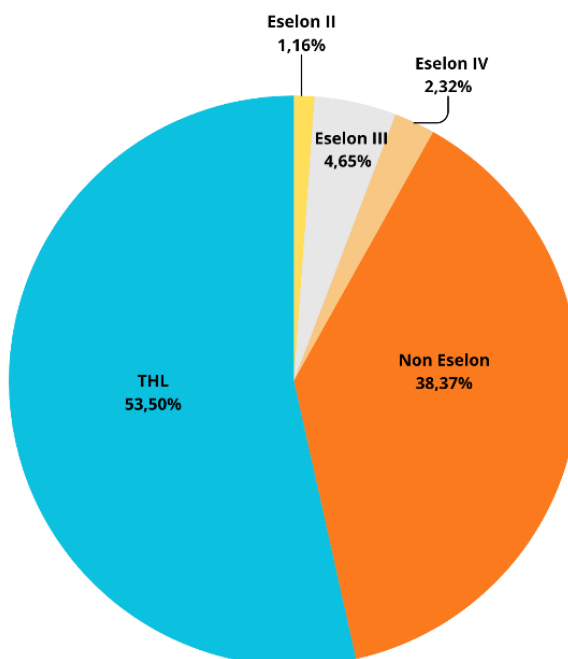
1. Jumlah Pegawai

A. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.1.

Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	Eselon II	1	0	1	1,16
2	Eselon III	1	3	4	4,65
3	Eselon IV	0	2	2	2,32
4	Non Eselon	17	16	33	38,37
5	THL	33	13	46	53,50
Total		52	34	86	100

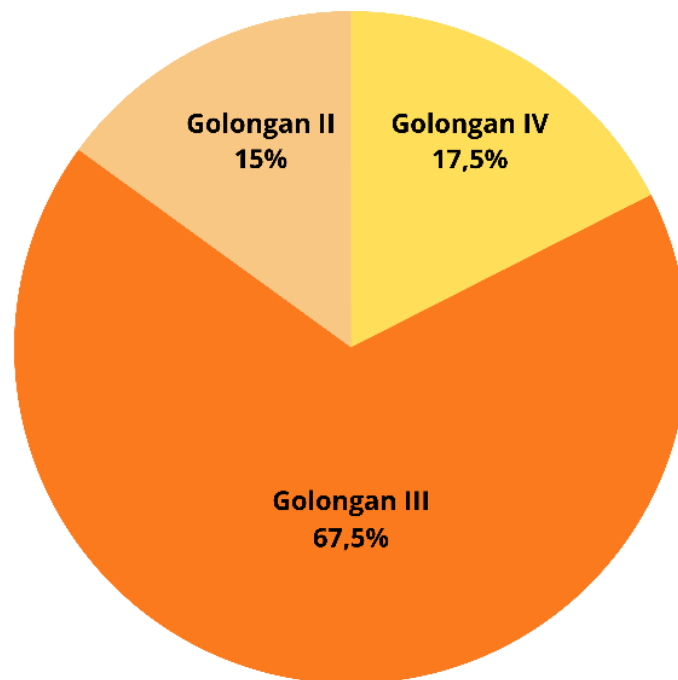


B. Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.2.

Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Golongan

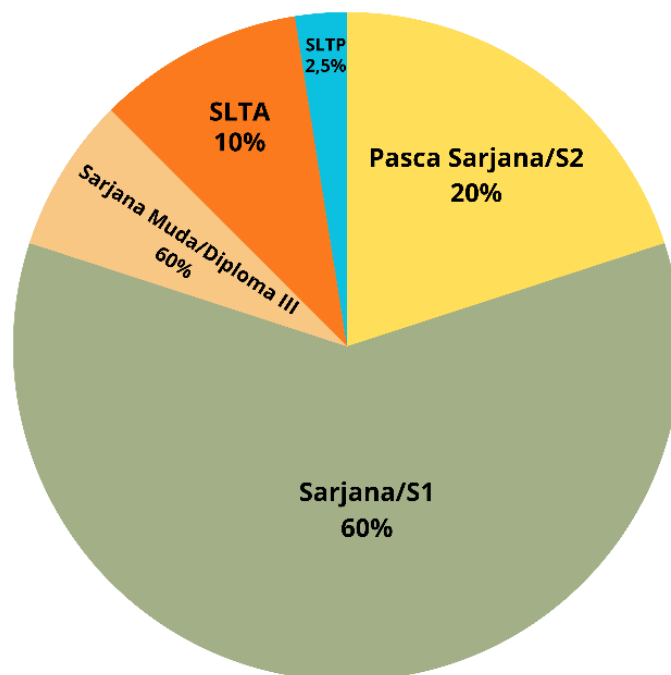
NO	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Golongan IV	3	4	7	17,5
2	Golongan III	11	16	27	67,5
3	Golongan II	5	1	6	15
4	Golongan I	0	0	0	0
Total		19	21	40	100



C. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3.
Data Pegawai Dinas Sosial Kota
Pekanbaru berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pasca sarjana/S2	4	4	8	20
2	Sarjana/S1	9	15	24	60
3	Sarjana Muda/Diploma III	2	1	3	7,5
4	SLTA	3	1	4	10
5	SLTP	1	0	1	2,5
Total		19	21	40	100



2. Aset Dinas Sosial

Tabel 2.4.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A - TANAH
TAHUN 2025

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
 Unit : Dinas Sosial
 Sub Unit : Dinas Sosial

No	Kode Unit	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Alamat	Luas	Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.01.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	23	31 Desember 1985	182,880,000	Jl. ABIDIN>Jl. Dt. Wan Abdul Rahman, Simpang tiga Kec. Bukit Raya (28288)	3,048 m ²	No : 48, tanggal 18-07-1985	kantor - HAK PAKAI
2	1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.01.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	132	31 Desember 2013	149,100,000	Jl. Inten Korong, Gg. Nantongga, Kp. Tengah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru (28121)	213 m ²	No : 2, tanggal 22-09-1998	kantor - HAK PAKAI
3	1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.01.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	139	31 Desember 2015	438,445,000	1. Jl. Sri Aminah , Desa Rumbai Bukit, Kec. Rumbai (28264), 2. Kecamatan Rumbai Pesisir (28261).	31,317 m ²	No : -, tanggal	Rencana Pembangunan Panti Sosial - Kota Rumbai Pekanbaru Desa Rumbai Bukit / ada 2 surat : 1. an. Mutia Eliza Un. Pemko uk. 18.000 M2. No. 080300 2. an. Mutia Eliza Un. Pemko uk.13.317,5 M2 No. 140007
#	TOTAL NILAI							Rp.770,425,000,-	#	#	#	#

Tabel 2.5.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2025

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
 Unit : Dinas Sosial
 Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Penyusutan	Spesifikasi	Kondisi	Nomor					Keterangan
											Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.01.004.	Multi Purpose Vehicle (MPV)	27	27 April 2022	452,700,000	242,517,857	Toyota Innova 2.4 V A/T GLN142R-MDTHKD	Baik	MHFAB8EM9N0114055	2GD-C986030	S01480001	BM 1327 A	00325810.F	Kepala Dinas Sosial/ Drs. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag APBD 2022
2	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	115	31 Desember 2012	175,990,000	175,990,000	TOYOTA New Avanza Veloz 1.5 M/T	Rusak Ringan	MHKM1CA4JCK027598	DDE8481	J05063529D	BM 1370 A	05668785.F	BUKHAJRO, S.Ag 1586 TP > 361 A > 381A> BM 1370 A
3	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	116	31 Desember 2012	304,786,356	304,786,356	TOYOTA Innova XW42	Rusak Ringan	MHF4W42G892149386	1TR6840157	G1092495D	BM 1338 TP	0087869/RU/	Dra. RAHMA NINGSIH, M.Si STNK TIDAK ADA
4	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	127	17 Juni 2014	188,064,890	188,064,890	TOYOTA New Avanza 1.5G M/T	Rusak Ringan	MHKM1CA3JEK018881	DEM8098	L00529426D	BM 1896 TP	11476596.B	ADRIYANI, SH --
5	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	128	17 Juni 2014	188,064,890	188,064,890	TOYOTA New Avanza 1.5G M/T	Rusak Ringan	MHKM1CA3JEK018198	DEJ0088	L00529425D	BM 1895 TP	11476595.B	YENI ERITA, S.Sos --
6	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	192	31 Desember 2015	203,510,000	203,510,000	SUZUKI GC415V-APV SDX MT	Rusak Ringan	MHYGDN42VFJ404652	G15AID366989	L10869841D	BM 1042 A	02513311	Kepala Sub Bagian Umum/ An. Suci Yusmalia, S.Stp --
7	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.03.002.	Pick Up	48	31 Desember 2007	151,800,000	151,800,000	FORD RANGER BASE 2.5L MT	Rusak Ringan	MNBBSBE407W694759	WLAT861771	E8844075D	BM 9185 AP	03486159.D	Kabid. Rehabilitasi Sosial SUMBER DARI PERLENGKAPAN/ RUSAK RINGAN
8	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	44	31 Desember 1995	5,500,000	5,500,000	HONDA ASTREA C 100	Rusak Ringan	NFGA18VK111776	NFGAE1110928	6654589D	BM 3713 AP	05647158.F	Noor Kamala, MM RUSAK RINGAN
9	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	62	31 Desember 1997	6,500,000	6,500,000	HONDA ASTREA C 100	Rusak Berat	NFG00VVR595389	NFGAE1597729	A.6654583-D	BM 3717 AP	0016567/RU/2013	GUDANG DINSOS RUSAK BERAT
10	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	63	31 Desember 1997	6,000,000	6,000,000	HONDA Win (MCB) 97	Rusak Ringan	MH1HABA15VK004005	HABAE1004051	6654592D	BM 3704 AP	05628849.F	AMIR HUSIN, ST APBD 1997
11	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	64	31 Desember 1997	6,000,000	6,000,000	HONDA ASTREA C 100	Rusak Ringan	MH1NFGA13VK111734	NFGAE112794	6654597D	BM 3711 AP	05647156.F	Suci Yusmalia, S.STP/Kasubag Umum --
12	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	65	31 Desember 1997	6,000,000	6,000,000	HONDA WIN100	Rusak Ringan	MH1HA000SSK166574	HAE2266282	A3410368D	BM 3114 AP	02513645.E	Dr. Ismail, M.Pd.I 3714 AP > 3114 AP RUSAK RINGAN
13	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	67	31 Desember 1997	7,000,000	7,000,000	HONDA Astrea C 100	Rusak Ringan	NFGA1XVX131754	NFGAE1131091	A8655625D	BM 3780 AP	05647157.F	Pengurus Barang/An. GUSNITA, SE RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2025

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
Unit : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Penyusutan	Spesifikasi	Kondisi	Nomor					Keterangan
											Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.01.004.	Mult Purpose Vehicle (MPV)	27	27 April 2022	452,700,000	242,517,857	Toyota Innova 2.4 V A/T GLN142R-MDTHXD	Baik	MHFAB8EM9N0114085	2GD-C986030	S01480001	BM 1327 A	00325810.F	Kepala Dinas Sosial/ Drs. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag APBD 2022
2	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	115	31 Desember 2012	175,990,000	175,990,000	TOYOTA New Avanza Veloz 1.5 M/T	Rusak Ringan	MHKM1CA4JCK027598	DDE8481	J05063529D	BM 1370 A	05668785.F	BUKHAIRO, S.Ag 1586 TP > 361 A > 381A- BM 1370 A
3	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	116	31 Desember 2012	304,786,356	304,786,356	TOYOTA Innova XW42	Rusak Ringan	MHFXW42G692149386	1TR6840157	G1092495D	BM 1338 TP	0087869/RU/	Dra. RAHMA NINGSIH, M.Si STNK TIDAK ADA
4	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	127	17 Juni 2014	188,064,890	188,064,890	TOYOTA New Avanza 1.5G M/T	Rusak Ringan	MHKM1CA3JEK018881	DEM8098	L00529426D	BM 1896 TP	11476596.B	ADRIYANI, SH --
5	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	128	17 Juni 2014	188,064,890	188,064,890	TOYOTA New Avanza 1.5G M/T	Rusak Ringan	MHKM1CA3JEK018198	DEJ0088	L00529425D	BM 1895 TP	11476596.B	YENI ERITA, S.Sos --
6	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	192	31 Desember 2015	203,510,000	203,510,000	SUZUKI GC415V-APV SDX MT	Rusak Ringan	MHYGDN42VFJ404652	G15AID366989	L10869841D	BM 1042 A	02513311	Kepala Sub Bagian Umum/ An. Suci Yusmalia, S.Stp --
7	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.03.002.	Pick Up	48	31 Desember 2007	151,800,000	151,800,000	FORD RANGER BASE 2.5L MT	Rusak Ringan	MNBBSBE407W694759	WLAT861771	E8844075D	BM 9185 AP	03486159.D	Kabid. Rehabilitasi Sosial SUMBER DARI PERLENGKAPAN/ RUSAK RINGAN
8	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	44	31 Desember 1995	5,500,000	5,500,000	HONDA ASTREA C 100	Rusak Ringan	NFGA18VK111776	NFGAE1110928	6654589D	BM 3713 AP	05647158.F	Noor Kamala, MM RUSAK RINGAN
9	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	62	31 Desember 1997	6,500,000	6,500,000	HONDA ASTREA C 100	Rusak Berat	NFG00VVR595389	NF6AE1597729	A.6654583-D	BM 3717 AP	0016567/RU/2013	GUDANG DINSOS RUSAK BERAT
10	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	63	31 Desember 1997	6,000,000	6,000,000	HONDA Win (MCB) 97	Rusak Ringan	MH1HABA15VK004005	HABAE1004051	6654592D	BM 3704 AP	05628849.F	AMIR HUSIN, ST APBD 1997
11	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	64	31 Desember 1997	6,000,000	6,000,000	HONDA ASTREA C 100	Rusak Ringan	MH1NFGA13VK111734	NFGAE1112794	6654597D	BM 3711 AP	05647156.F	Suci Yusmalia, S.STP/Kasubag Umum --
12	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	65	31 Desember 1997	6,000,000	6,000,000	HONDA WIN100	Rusak Ringan	MH1HA0005SK166574	HAE2266282	A3410368D	BM 3114 AP	02513645.E	Dr. Ismail, M.Pd.I 3714 AP > 3114 AP RUSAK RINGAN
13	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.02.02.01.04.001.	Sepeda Motor	67	31 Desember 1997	7,000,000	7,000,000	HONDA Astrea C 100	Rusak Ringan	NFGA1XVX131754	NFGAE1131091	A6655625D	BM 3780 AP	05647157.F	Pengurus Barang/An. GUSNITA, SE RUSAK RINGAN

Tabel 2.6.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C - GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN 2025

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
 Unit : Dinas Sosial
 Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Alamat	Luas	Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.03.01.01.01.001.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	45	31 Desember 2007	114,842,000	JL.ZAINAL ABIDIN>Jl. Dt. Wan Abdul Rahman, Simpang tiga, Kec. Bukit Raya (28288)	130 m ²	SHELTER DINAS SOSIAL (Sekretariat PKH)	LOKA BINA KARYA
2	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.03.01.01.01.001.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	46	31 Desember 2007	606,076,000	JL. INTENKORONG, Gg. Nantongga, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi (28121)	565 m ²	Rencana di peruntukan untuk Menampung anak-anak terlantar	LBK
3	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.03.01.01.02.001.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	31 Desember 2007	83,014,000	JL. ABIDIN>Jl. Dt. Wan Abdul Rahman, Simpang tiga Kec. Bukit Raya (28288)	128 m ²	Gudang Tagana dan Rumah ibu asuh	--
4	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.03.01.01.13.001.	Gedung Pos Jaga Permanen	2	31 Desember 2007	197,656,000	JL. ABIDIN>Jl. Dt. Wan Abdul Rahman, Simpang tiga Kec. Bukit Raya (28288)	78 m ²	Pos Jaga dan Cleaning Service Selter dan Pendopo	RUMAH JAGA LBK DAN PENDOPO
5	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.03.01.02.04.001.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	31 Desember 2007	378,118,000	JL. ABIDIN>Jl. Dt. Wan Abdul Rahman, Simpang tiga Kec. Bukit Raya (28288)	100 m ²	Mess Laki-laki, Mess Perempuan, Aula dan ruang Assesment	--
#	TOTAL NILAI						Rp.1,379,706,000,-	#	#	#	#

Tabel 2.7.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
TAHUN 2025

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
 Unit : Dinas Sosial
 Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Alamat	Luas	Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.04.03.06.03.001.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	31 Desember 2013	4,500,000	JL. ABIDIN>Jl. Dt. Wan Abdul Rahman, Simpang tiga Kec. Bukit Raya (28288)	0	Shelter/Dinsos	PEMASANGAN INSATASI LISTRIK RECLASS KIB C
2	Dinas Sosial	Dinas Sosial	01.03.04.04.01.04.004.	Jaringan Sambungan Ke Rumah Lain-Lain	3	31 Desember 2013	20,000,000	JL. ABIDIN>Jl. Dt. Wan Abdul Rahman, Simpang tiga Kec. Bukit Raya (28288)	0	Shelter/Dinsos	SUMUR BOR
#	TOTAL NILAI						Rp.24,500,000,-	#	#	#	#

Tabel 2.8.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUN 2025

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
 Unit : Dinas Sosial
 Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Jenis KDP	Alamat	Dokumen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	TOTAL NILAI						Rp.0,-	#	#	#	#

Tabel 2.9.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E - ASET TETAP LAINNYA
TAHUN 2025

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
 Unit : Dinas Sosial
 Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak		Hewan / Ternak dan Tumbuhan		Keterangan
								Judul Buku	Penerbit Buku	Asal Barang	Bahan Barang	Jenis Tanaman	Ukuran Tanaman	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
#	TOTAL NILAI						Rp.0,-	#	#	#	#	#	#	#

C. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS SOSIAL

- Lingkungan Internal

Kelompok sasaran layanan internal Dinas Sosial mencakup seluruh unsur aparatur dan perangkat pendukung yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di lingkungan Dinas Sosial. Kelompok ini terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana administrasi, tenaga teknis lapangan, serta tenaga pendukung lainnya yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Fokus layanan terhadap kelompok sasaran internal diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Upaya penguatan layanan internal dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, pengembangan karier berbasis kinerja, penerapan sistem merit, optimalisasi sistem informasi manajemen sosial berbasis digital, serta pembinaan kedisiplinan dan etika kerja aparatur. Selain itu, Dinas Sosial juga berupaya mendorong terciptanya budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, adaptif terhadap perubahan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan internal ini juga mencakup peningkatan koordinasi antarbidang, penyempurnaan mekanisme perencanaan dan pelaporan kinerja, serta penguatan tata kelola kelembagaan agar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Dengan demikian, penguatan kelompok sasaran internal diharapkan dapat menciptakan aparatur yang tangguh, berkinerja tinggi, dan berorientasi pada pelayanan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

- Lingkungan Eksternal

Kelompok sasaran layanan eksternal Dinas Sosial mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial akibat kondisi kerentanan atau permasalahan sosial yang dihadapi. Kelompok sasaran eksternal ini terdiri atas individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun yang termasuk dalam kelompok sasaran eksternal antara lain: fakir miskin, keluarga tidak mampu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan dan eksploitasi, korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan napza, korban bencana alam maupun bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial, komunitas adat terpencil, dan kelompok rentan lainnya yang mengalami ketidakberdayaan sosial maupun ekonomi. Selain itu, sasaran eksternal juga mencakup lembaga kesejahteraan sosial, organisasi masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat (PSM), dan relawan sosial yang berperan sebagai mitra strategis Dinas Sosial dalam pelaksanaan program sosial di berbagai tingkatan wilayah.

Layanan terhadap kelompok sasaran eksternal ini diarahkan pada upaya pemulihan dan penguatan fungsi sosial masyarakat melalui penyediaan berbagai bentuk intervensi sosial, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial berpedoman pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pendekatan berbasis inklusif, partisipatif, dan berkeadilan agar setiap penerima manfaat memperoleh hak dan layanan sosial secara proporsional. Seluruh upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka menengah Dinas Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip transparansi, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan sosial.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

A. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi sasaran, meningkatnya urbanisasi menjadi salah satu faktor permasalahan meningkatnya PPKS di Kota Pekanbaru, terutama gelandangan dan pengemis, yang kemudian sering berkembang menjadi permasalahan sosial lainnya, seperti anak terlantar, disabilitas terlantar sampai dengan lanjut usia terlantar, serta tidak menutup kemungkinan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), selain urbanisasi, masih terdapat banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diluar Panti yang memerlukan perhatian dan atensi dari Pemerintah Kota Pekanbaru, PPKS

diluar Panti, yang umumnya menjadi warga binaan panti atau yayasan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh masyarakat, melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memenuhi sedikitnya sandang dan papan, sedangkan dalam upaya penanganan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dimana PSKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan sosial, sehingga pencapaian Kinerja Dinas Sosial bisa Optimal.

Berdasarkan keterangan diatas, maka permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru diantaranya :

1. Meningkatnya Jumlah PPKS di Kota Pekanbaru;
2. Minimnya Sumber Daya PSKS yang Kompeten.

Kedua permasalahan diatas, menjadi tolak ukur pencapaian Kinerja dan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, adapun faktor yang dapat menghambat pencapaian kinerja dan pelayanan diantaranya:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas perbatasan Kota Pekanbaru
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial Kota Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan dengan belum berjalannya pelayanan sesuai dengan mekanisme (SOP) atau pedoman dan sistem untuk pengendalian.
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi peningkatan kesejahteraan sosial Kota Pekanbaru.
4. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru selama ini masih difokuskan hanya sebatas realisasi kegiatan fisik dan anggaran.
5. Belum lengkapnya data dan informasi PPKS.
6. Data dan informasi PPKS yang menggambarkan beberapa jenis PPKS yang ada di Kota Pekanbaru belum tersedia lengkap.
7. Belum optimalnya pemanfaatan dan analisis data PPKS untuk perencanaan peningkatan kesejahteraan sosial.

8. Masih terbatasnya aparatur Dinas Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lainnya yang memiliki kompetensi dan berlatar belakang Kesejahteraan Sosial.
9. Terbatasnya Anggaran pelaksanaan Kesejahteraan Sosial.

B. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta faktor penghambat pelayanan kesejahteraan sosial diatas, menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi atau daerah. Isu ini bersifat fundamental, bisa terkait dengan pilihan kebijakan atau tantangan kritis yang perlu diatasi agar Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat mencapai tujuannya, isu-isu strategis tersebut, diantaranya :

- 1) Peningkatan Pelayanan dan Rehabiltasi PPKS.
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
- 3) Optimalisasi Pendayagunaan data dan Informasi PPKS.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STARETGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru selama lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk mewujudkan arah kebijakan yang terukur, terpadu, dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), agar mampu hidup secara mandiri, produktif, dan berdaya saing di tengah dinamika sosial ekonomi perkotaan. Secara lebih rinci, tujuan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Sebagai acuan dan pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam merumuskan prioritas program, kegiatan, dan sub-kegiatan tahunan di bidang kesejahteraan sosial yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 serta kebijakan nasional bidang sosial.
2. Mewujudkan kesamaan persepsi dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sehingga seluruh perangkat kerja dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara sinergis, transparan, dan akuntabel dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat.
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) selama lima tahun ke depan.
4. Meningkatkan standar hidup layak masyarakat, terutama bagi kelompok miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya melalui pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial secara menyeluruh.
5. Mendorong penguatan kelembagaan sosial dan partisipasi masyarakat, termasuk potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), agar mampu menjadi mitra aktif pemerintah dalam penanganan dan

pencegahan masalah sosial, sekaligus menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat.

6. Mengembangkan inovasi dan digitalisasi pelayanan sosial, guna mempercepat penyaluran bantuan, memperkuat basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta mewujudkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
7. Menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan alat evaluasi bagi keberhasilan pelaksanaan misi Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang sosial, sehingga tercapai sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya masyarakat Pekanbaru yang berbudaya, maju, dan sejahtera.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan, sekaligus menjadi ukuran konkret atas capaian yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian, ketahanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru secara menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang terarah dan berkeadilan.

Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan. Keberhasilan diukur dari meningkatnya jumlah PMKS yang tertangani dan menurunnya tingkat kerentanan sosial masyarakat.

2. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur serta tenaga kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial menargetkan peningkatan kompetensi aparatur dan pekerja sosial, baik melalui pelatihan, sertifikasi, maupun pendampingan teknis, sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan empatik kepada masyarakat.

3. Tersedianya dan terbaruinya data kesejahteraan sosial yang valid dan terpadu.

Melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sistem informasi sosial berbasis digital, Dinas Sosial berupaya mewujudkan basis data yang akurat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara berkelanjutan.

4. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Tagana, dan kelompok masyarakat lainnya dalam mengembangkan kegiatan sosial berbasis komunitas, yang menumbuhkan solidaritas, kemandirian, dan kepedulian sosial.

5. Menurunnya jumlah dan kompleksitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dinas Sosial menargetkan adanya penurunan signifikan jumlah PMKS, termasuk fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan gelandangan/pengemis, melalui intervensi rehabilitasi sosial, bantuan sosial, serta pembinaan berkelanjutan.

6. Meningkatnya kecepatan dan ketepatan penanganan korban bencana sosial maupun bencana alam.

Sasaran ini menekankan peningkatan kemampuan tanggap darurat sosial melalui koordinasi lintas sektor, penguatan logistik, kesiapsiagaan Tagana, dan penyediaan rumah perlindungan sementara (shelter) yang memadai.

7. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan publik di bidang sosial.

Dinas Sosial berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik sosial.

8. Terwujudnya inovasi dan sinergi program sosial lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Dinas Sosial mendorong integrasi program antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk kolaborasi sosial yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga.

9. Terciptanya masyarakat Kota Pekanbaru yang berdaya, tangguh, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi.

Sasaran ini menjadi wujud akhir dari seluruh upaya strategis Dinas Sosial untuk menumbuhkan kesetiakawanan sosial, kepedulian antarwarga, dan semangat gotong royong sebagai nilai budaya lokal dalam membangun masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Dinas Sosial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- Terwujudnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin - Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	68,32	69,38	71,25	72,33	72,35	74,5	
			Persentase penduduk miskin (%)	2,89	2,685	2,48	2,28	2,085	1,89	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan PPKS dan Pemberdayaan PSKS	Persentase PSKS yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	
			Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial yang prima dan akuntanble	Nilai IKM Perangkat Daerah (Nilai)	83,5	84	84,5	85	85,5	86	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	63,50	65,00	66,50	68,00	69,50	71,50	

3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat

daerah. Strategi ini dirancang berdasarkan analisis kondisi sosial masyarakat Kota Pekanbaru, potensi sumber daya, permasalahan sosial yang dihadapi, serta isu strategis yang berkembang baik di tingkat lokal maupun nasional.

Penyusunan strategi ini juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029, sehingga arah kebijakan yang ditetapkan bersifat terintegrasi, sinergis, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan pengurangan kesenjangan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menetapkan beberapa strategi pokok sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pelayanan sosial.

Meningkatkan kapasitas organisasi, sistem kerja, dan koordinasi lintas bidang agar pelaksanaan program kesejahteraan sosial lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Strategi ini mencakup penerapan sistem manajemen berbasis kinerja, reformasi birokrasi, serta digitalisasi pelayanan publik sosial.

2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang sosial.

Melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan terhadap aparatur, pekerja sosial, TKSK, Tagana, dan relawan sosial agar memiliki kompetensi teknis, manajerial, serta etika pelayanan yang baik.

3. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial.

Melaksanakan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial secara tepat sasaran dengan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk penguatan sistem penjangkauan bagi PMKS di luar panti.

4. Pemantapan sistem data dan informasi kesejahteraan sosial yang akurat dan terintegrasi.

Mengembangkan basis data sosial terupdate melalui pemutakhiran DTSEN, pemanfaatan teknologi informasi, serta integrasi dengan sistem nasional dan perangkat daerah lainnya agar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial.

Melalui pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, WKSMB, dunia usaha, dan masyarakat agar lebih aktif dalam mencegah serta menangani permasalahan sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

6. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan kemitraan strategis.

Mengoptimalkan kerja sama antara Dinas Sosial dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta sektor swasta dalam penyelenggaraan program sosial terpadu dan inovatif.

7. Peningkatan efektivitas penanganan bencana sosial dan bencana alam.

Melalui penguatan kesiapsiagaan Tagana, penyediaan shelter, peningkatan kapasitas tanggap darurat, serta sistem koordinasi cepat antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat terdampak.

8. Pengembangan inovasi sosial dan teknologi pelayanan publik.

Menghadirkan inovasi berbasis digital seperti aplikasi layanan sosial terpadu, sistem pengaduan online, dan dashboard monitoring kesejahteraan sosial untuk mempercepat akses dan transparansi layanan publik.

9. Pemantapan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kepahlawanan, dan kebangsaan.

Melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan generasi muda, dan penguatan karakter masyarakat, sehingga nilai gotong royong dan solidaritas sosial tetap menjadi fondasi kehidupan sosial di Kota Pekanbaru.

10. Penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis kinerja.

Menetapkan sistem evaluasi berkelanjutan atas program dan kegiatan agar hasil pembangunan sosial dapat diukur secara objektif, terarah, dan menjadi dasar perbaikan kebijakan di periode selanjutnya.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Sosial Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan strategi di atas, arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru meliputi :

1. Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial, melalui optimalisasi rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, serta tuna sosial.

2. Kebijakan penguatan jaminan dan perlindungan sosial, terutama bagi korban bencana, masyarakat miskin, dan kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kehidupannya.
3. Kebijakan pengembangan pemberdayaan sosial, dengan memfokuskan pada peningkatan kapasitas keluarga miskin, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial agar mampu mengelola potensi lokal dan berkontribusi pada ekonomi sosial.
4. Kebijakan penguatan data dan informasi sosial, melalui pemutakhiran DTSEN, digitalisasi layanan, dan integrasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS-NG) secara berkelanjutan.
5. Kebijakan peningkatan kapasitas SDM sosial, baik aparatur maupun non- aparatur, untuk memperkuat kualitas pelayanan dan mempercepat transformasi digital di bidang kesejahteraan sosial.
6. Kebijakan pengembangan inovasi dan kolaborasi lintas sektor, untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan memperluas dampak positif program sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.
7. Kebijakan pemeliharaan nilai-nilai sosial dan budaya lokal, dengan menanamkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kesetiakawanan dalam setiap aktivitas sosial kemasyarakatan.
8. Kebijakan penguatan kelembagaan sosial masyarakat, agar LKS, Karang Taruna, dan PSKS menjadi mitra aktif pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pencegahan masalah sosial.
9. Kebijakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, melalui sistem pengelolaan keuangan dan kinerja yang efisien, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, program merupakan kumpulan kegiatan yang dirancang secara terarah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi dalam jangka menengah lima tahun. Program berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengimplementasikan kebijakan strategis yang telah ditetapkan, dengan fokus pada hasil (outcome) yang ingin dicapai. Setiap program mencerminkan prioritas pembangunan dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta penganggaran. Dalam konteks Renstra 2025-2029, program disusun agar selaras dengan arah kebijakan nasional maupun prioritas organisasi, sehingga pelaksanaannya mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator kinerja dalam Renstra 2025-2029 berperan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan. Indikator kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah tercapai secara efektif dan efisien. Setiap program memiliki indikator yang spesifik, terukur, realistis, dan berbatas waktu (SMART), mencakup indikator input, output, dan outcome. Melalui indikator tersebut, organisasi dapat melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala, sehingga arah pelaksanaan program dapat terus disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan. Dengan demikian, keberadaan program dan indikator kinerja dalam Renstra 2025-2029 menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil.

4.1 Uraian Program

Adapun program yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- b. **Program Pemberdayaan Sosial**
- c. **Program Rehabilitasi Sosial**
- d. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
- e. **Program Penanganan Bencana**

4.2 Uraian Kegiatan

- a. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.4. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - 1.5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.3. Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
 - 2.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

c. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1.1. Penyediaan Permakanan
 - 1.2. Penyediaan Sandang
 - 1.3. Penyediaan Alat Bantu
 - 1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- 1.7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 1.8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- 1.9. Pemberian Layanan Kedaruratan
- 1.10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 1.11. Pemberian Layanan Rujukan
- 1.12. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 2.1. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

d. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- 1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - 1.1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - 1.2. Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - 1.3. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 2.4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

e. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penyediaan Makanan
 - 1.2. Penyediaan Sandang
 - 1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial
- 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - 2.2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Tabel 4.3.

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN					
			2025		2026		2027		2028		2029					2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					18.299.523.852,00		19.246.357.662,00		20.193.191.471,00		21.140.025.280,00		22.086.859.089,00							
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.673.158.044,00		9.538.299.947,00		10.758.581.580,00		11.043.873.370,00		11.451.307.179,00							
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	100	100	100	8.673.158.044,00	100	9.538.299.947,00	100	10.758.581.580,00	100	11.043.873.370,00	100	11.451.307.179,00	1.06.0.00.0.00.01.00 - DINAS SOSIAL						
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28.260.980,00		33.260.980,00		33.260.980,00		33.260.980,00		48.260.980,00							
Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	1	28.260.980,00	1	33.260.980,00	1	33.260.980,00	1	33.260.980,00	1	48.260.980,00							
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		4	4	4	4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		2	2	2	2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.976.600,00				7.976.600,00				7.976.600,00		7.976.600,00		10.976.600,00		KOTA PEKANBARU
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	6.976.600,00	2	7.976.600,00	2	7.976.600,00	2	7.976.600,00	2	10.976.600,00							
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6.284.940,00		7.284.940,00		7.284.940,00		7.284.940,00		10.284.940,00		KOTA PEKANBARU					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	6.284.940,00	1	7.284.940,00	1	7.284.940,00	1	7.284.940,00	1	10.284.940,00				
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.999.900,00		5.999.900,00		5.999.900,00		5.999.900,00		8.999.900,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4	4.999.900,00	4	5.999.900,00	4	5.999.900,00	4	5.999.900,00	4	8.999.900,00				
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					4.999.780,00		5.999.780,00		5.999.780,00		5.999.780,00		8.999.780,00		KOTA PEKANBARU		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1	4.999.780,00	1	5.999.780,00	1	5.999.780,00	1	5.999.780,00	1	8.999.780,00				
1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					4.999.760,00		5.999.760,00		5.999.760,00		5.999.760,00		8.999.760,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	1	4.999.760,00	1	5.999.760,00	1	5.999.760,00	1	5.999.760,00	1	8.999.760,00				
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.907.562.487,00		5.147.615.386,00		5.513.562.487,00		5.615.562.487,00		5.617.562.487,00				
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	40	41	4.907.562.487,00	41	5.147.615.386,00	41	5.513.562.487,00	42	5.615.562.487,00	42	5.617.562.487,00				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.895.123.877,00		5.133.176.776,00		5.495.123.877,00		5.595.123.877,00		5.595.123.877,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	40	41	4.895.123.877,00	41	5.133.176.776,00	41	5.495.123.877,00	42	5.595.123.877,00	42	5.595.123.877,00				
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					6.710.180,00		7.710.180,00		9.710.180,00		10.710.180,00		11.710.180,00		KOTA PEKANBARU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN				
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	6.710.180,00	1	7.710.180,00	1	9.710.180,00	1	10.710.180,00	1	11.710.180,00							
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					5.728.430,00		6.728.430,00		8.728.430,00		9.728.430,00		10.728.430,00		KOTA PEKANBARU					
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1	5.728.430,00	1	6.728.430,00	1	8.728.430,00	1	9.728.430,00	1	10.728.430,00							
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					11.136.090,00		15.136.090,00		18.136.090,00		21.136.090,00		24.136.090,00							
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	11.136.090,00	1	15.136.090,00	1	18.136.090,00	1	21.136.090,00	1	24.136.090,00							
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1			
1.06.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					3.378.690,00		4.378.690,00		5.378.690,00		6.378.690,00		7.378.690,00		KOTA PEKANBARU					
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	3.378.690,00	1	4.378.690,00	1	5.378.690,00	1	6.378.690,00	1	7.378.690,00							
1.06.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					3.378.610,00		5.378.610,00		6.378.610,00		7.378.610,00		8.378.610,00		KOTA PEKANBARU					
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	1	3.378.610,00	1	5.378.610,00	1	6.378.610,00	1	7.378.610,00	1	8.378.610,00							
1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					4.378.790,00		5.378.790,00		6.378.790,00		7.378.790,00		8.378.790,00		KOTA PEKANBARU					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	4.378.790,00	1	5.378.790,00	1	6.378.790,00	1	7.378.790,00	1	8.378.790,00				
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00				
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	5	50.000.000,00	0	100.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	300.000.000,00				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0		0		0		0							
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1		1		2		2							
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0		0		0		0							
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	0,00	1	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00				
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	5	50.000.000,00	0	0,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	150.000.000,00				
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.006.802.531,00		1.186.063.511,00		1.224.563.511,00		1.465.822.278,00		1.699.963.280,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1	1	90.084.010,00	1	93.084.010,00	1	54.084.010,00	1	55.084.010,00	1	58.084.010,00				
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					350.827.600,00		370.827.600,00		295.927.600,00		295.927.600,00		295.927.600,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhnya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	159	159	159	350.827.600,00	159	370.827.600,00	159	295.927.600,00	159	295.927.600,00	159	295.927.600,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700	700	700	100.972.840,00	700	130.972.840,00	700	100.972.840,00	700	100.972.840,00	700	100.972.840,00				
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					12.590.640,00		15.190.040,00		17.190.040,00		19.190.040,00		21.190.040,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	300	12.590.640,00	300	15.190.040,00	300	17.190.040,00	300	19.190.040,00	300	21.190.040,00				
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial					12.434.540,00		15.934.540,00		17.934.540,00		19.934.540,00		21.934.540,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhnya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	300	12.434.540,00	300	15.934.540,00	300	17.934.540,00	300	19.934.540,00	300	21.934.540,00				
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					100.416.134,00		314.416.131,00		255.416.131,00		255.416.131,00		255.416.131,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15	100.416.134,00	15	314.416.131,00	15	255.416.131,00	15	255.416.131,00	15	255.416.131,00				
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					440.911.610,00		463.911.610,00		350.011.610,00		351.011.610,00		354.011.610,00				
Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	159	159	159	440.911.610,00	159	463.911.610,00	159	350.011.610,00	159	351.011.610,00	159	354.011.610,00				
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1	1		1		1		1		1					
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					90.084.010,00		93.084.010,00		54.084.010,00		55.084.010,00		58.084.010,00		KOTA PEKANBARU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN				
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	100	100	100	436.882.000,00	110	356.882.800,00	120	261.882.800,00	130	266.882.800,00	140	271.882.800,00							
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.068.258.444,00		1.429.358.841,00		1.230.458.841,00		1.309.458.841,00		1.316.458.841,00							
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	1.068.258.444,00	100	1.429.358.841,00	100	1.230.458.841,00	100	1.309.458.841,00	100	1.316.458.841,00	1.06.0.00.0.00.01.00 - DINAS SOSIAL						
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					627.346.834,00		965.447.231,00		880.447.231,00		958.447.231,00		962.447.231,00							
Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700	700	700	627.346.834,00	700	965.447.231,00	700	880.447.231,00	700	958.447.231,00	700	962.447.231,00							
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaiain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700	700	700		700		700		700		700		700	700	700	700			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	300		300		300		300		300		300	300	300	300			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	300		300		300		300		300		300	300	300	300			
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15		15		15		15		15		15	15	15	15			
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan					400.932.680,00		488.933.680,00		488.933.680,00		562.933.680,00		562.933.680,00		KOTA PEKANBARU					
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700	700	700	400.932.680,00	700	488.933.680,00	700	488.933.680,00	700	562.933.680,00	700	562.933.680,00							
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang					100.972.840,00		130.972.840,00		100.972.840,00		100.972.840,00		100.972.840,00		KOTA PEKANBARU					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar					12.408.610,00		12.408.610,00		12.408.610,00		62.408.610,00		162.408.610,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15	12.408.610,00	15	12.408.610,00	15	12.408.610,00	15	62.408.610,00	15	162.408.610,00				
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					6.503.756.347,00		5.671.093.170,00		5.196.093.170,00		5.201.093.170,00		5.206.093.170,00				
Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	800	800	800	6.503.756.347,00	13.971	5.671.093.170,00	13.971	5.196.093.170,00	13.971	5.201.093.170,00	13.971	5.206.093.170,00				
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	235.230	235.230	235.230		235.240		235.250		235.260		235.270					
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	250	250		255		260		265		270					
	Jumlah Usulan Perindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	100	100	100		110		120		130		140					
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					310.783.800,00		320.783.800,00		320.783.800,00		320.783.800,00		320.783.800,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	235.230	235.230	235.230	310.783.800,00	235.240	320.783.800,00	235.250	320.783.800,00	235.260	320.783.800,00	235.270	320.783.800,00				
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					583.397.848,00		590.396.300,00		590.396.300,00		590.396.300,00		590.396.300,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	250	250	583.397.848,00	255	590.396.300,00	260	590.396.300,00	265	590.396.300,00	270	590.396.300,00				
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					5.172.692.699,00		4.403.030.270,00		4.023.030.270,00		4.023.030.270,00		4.023.030.270,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	800	800	800	5.172.692.699,00	13.971	4.403.030.270,00	13.971	4.023.030.270,00	13.971	4.023.030.270,00	13.971	4.023.030.270,00				
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					436.882.000,00		356.882.800,00		261.882.800,00		266.882.800,00		271.882.800,00		KOTA PEKANBARU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU	
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					96.815.350,00		96.815.350,00		96.815.350,00		146.815.350,00		196.815.350,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	96.815.350,00	1	96.815.350,00	1	96.815.350,00	1	146.815.350,00	1	196.815.350,00			
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					6.596.242.127,00		5.766.578.950,00		5.338.578.950,00		5.393.578.950,00		5.598.578.950,00			
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	88	89	90	6.596.242.127,00	90	5.766.578.950,00	90	5.338.578.950,00	90	5.393.578.950,00	90	5.598.578.950,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL		
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					92.485.780,00		95.485.780,00		142.485.780,00		192.485.780,00		392.485.780,00			
Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15	92.485.780,00	15	95.485.780,00	15	142.485.780,00	15	192.485.780,00	15	392.485.780,00			
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	15		15		15		15		15				
	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15		15		15		15		15				
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					22.632.920,00		22.632.920,00		22.632.920,00		22.632.920,00		122.632.920,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	15	22.632.920,00	15	22.632.920,00	15	22.632.920,00	15	22.632.920,00	15	122.632.920,00			
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar					57.444.250,00		60.444.250,00		107.444.250,00		107.444.250,00		107.444.250,00		KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15	57.444.250,00	15	60.444.250,00	15	107.444.250,00	15	107.444.250,00	15	107.444.250,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhnya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	0		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					0,00		0,00		100.042.354,00		150.042.354,00		202.042.354,00				KOTA PEKANBARU
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	100	100.042.354,00	150	150.042.354,00	200	202.042.354,00				
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Pemakanan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU
Terpenuhinya Kebutuhan Pemakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar Panti Sosial dalam 1 tahun	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	96.815.350,00	0	96.815.350,00	0	196.857.704,00	0	296.857.704,00	0	398.857.704,00				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	0		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		100		150		200					
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50	24.518.460,00	50	49.457.639,00	50	74.518.460,00	50	94.518.460,00	50	124.518.460,00				
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					60.200.000,00		90.200.000,00		160.200.000,00		160.200.000,00		160.200.000,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	60.200.000,00	450	90.200.000,00	450	160.200.000,00	450	160.200.000,00	450	160.200.000,00				
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan					35.356.200,00		75.356.200,00		95.356.200,00		135.356.200,00		135.356.200,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	35.356.200,00	450	75.356.200,00	450	95.356.200,00	450	135.356.200,00	450	135.356.200,00				
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					44.656.500,00		64.656.500,00		94.656.500,00		144.656.500,00		144.656.500,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25	44.656.500,00	25	64.656.500,00	25	94.656.500,00	25	144.656.500,00	25	144.656.500,00				
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan					25.627.070,00		75.627.070,00		100.627.070,00		125.627.070,00		145.627.070,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	25.627.070,00	450	75.627.070,00	450	100.627.070,00	450	125.627.070,00	450	145.627.070,00				
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota					19.246.520,00		39.246.520,00		59.246.520,00		69.246.520,00		69.246.520,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhnya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15	19.246.520,00	15	39.246.520,00	15	59.246.520,00	15	69.246.520,00	15	69.246.520,00				
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial					96.815.350,00		96.815.350,00		196.857.704,00		296.857.704,00		398.857.704,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terpenuhinya Kebutuhan Pemakaian Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaian Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	90.350.600,00	450	188.350.600,00	450	133.808.581,00	450	208.350.600,00	450	258.350.600,00				
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang					88.742.770,00		145.742.770,00		185.742.770,00		185.742.770,00		185.742.770,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Memerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	88.742.770,00	450	145.742.770,00	450	185.742.770,00	450	185.742.770,00	450	185.742.770,00				
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu					99.727.083,00		199.727.083,00		119.727.083,00		119.727.083,00		169.727.083,00		KOTA PEKANBARU		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50	99.727.083,00	50	199.727.083,00	50	119.727.083,00	50	119.727.083,00	50	169.727.083,00				
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					76.561.510,00		83.561.510,00		120.561.510,00		173.561.510,00		173.561.510,00		KOTA PEKANBARU		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50	76.561.510,00	50	83.561.510,00	50	120.561.510,00	50	173.561.510,00	50	173.561.510,00				
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					155.638.140,00		165.638.140,00		165.638.140,00		195.638.140,00		195.638.140,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50	155.638.140,00	50	165.638.140,00	50	165.638.140,00	50	195.638.140,00	50	195.638.140,00				
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					55.075.220,00		85.075.220,00		105.075.220,00		135.075.220,00		135.075.220,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25	55.075.220,00	25	85.075.220,00	25	105.075.220,00	25	135.075.220,00	25	135.075.220,00				
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					24.518.460,00		49.457.639,00		74.518.460,00		94.518.460,00		124.518.460,00		KOTA PEKANBARU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450		450		450		450		450					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450		450		450		450		450					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50		50		50		50		50					
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450		450		450		450		450					
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15		15		15		15		15					
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50		50		50		50		50					
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25		25		25		25		25					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50		50		50		50		50					
	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450		450		450		450		450					
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan					90.350.600,00		188.350.600,00		133.808.581,00		208.350.600,00		258.350.600,00			KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	5	0,00	5	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00				
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KOTA PEKANBARU		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	5	0,00	5	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00				
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					872.515.423,00		1.359.454.602,00		1.612.015.758,00		2.044.557.777,00		2.296.557.777,00				
meningkatkan rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dasar (%)	100	100	100	872.515.423,00	100	1.359.454.602,00	100	1.612.015.758,00	100	2.044.557.777,00	100	2.296.557.777,00	1.06.0.00.0.00.01.00 - DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					775.700.073,00		1.262.639.252,00		1.415.158.054,00		1.747.700.073,00		1.897.700.073,00				
Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	775.700.073,00	450	1.262.639.252,00	450	1.415.158.054,00	450	1.747.700.073,00	450	1.897.700.073,00				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50		50		50		50		50					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25		25		25		25		25					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	0	0	97	252.224.792,00	97	282.540.300,00	98	282.540.300,00	98	302.540.300,00	99	302.540.300,00				
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					18.356.400,00		18.356.400,00		20.356.400,00		20.356.400,00		20.356.400,00		Sukajadi		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	10	18.356.400,00	10	18.356.400,00	10	20.356.400,00	10	20.356.400,00	10	20.356.400,00				
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					296.442.002,00		309.442.002,00		287.442.002,00		307.442.002,00		327.442.002,00		KOTA PEKANBARU		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)			115	296.442.002,00	117	309.442.002,00	120	287.442.002,00	122	307.442.002,00	125	327.442.002,00				
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	0,00	100	0,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 - DINAS SOSIAL			
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	10		10		10		10		10					
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)			115		117		120		122		125					
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	50	50		55		60		65		70					
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20	25	30		35		40		45		50					
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					218.777.780,00		228.777.780,00		253.777.780,00		278.777.780,00		303.777.780,00			KOTA PEKANBARU	
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	50	50	218.777.780,00	55	228.777.780,00	60	253.777.780,00	65	278.777.780,00	70	303.777.780,00				
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					277.876.840,00		287.876.840,00		307.876.840,00		337.876.840,00		367.876.840,00			KOTA PEKANBARU	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20	25	30	277.876.840,00	35	287.876.840,00	40	307.876.840,00	45	337.876.840,00	50	367.876.840,00				
1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan					252.224.792,00		282.540.300,00		282.540.300,00		302.540.300,00		302.540.300,00			KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00	1	0,00	0	0,00				
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.089.349.814,00		1.152.665.322,00		1.203.556.342,00		1.298.556.342,00		1.373.956.342,00				
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	84	85	86	1.089.349.814,00	87	1.152.665.322,00	87	1.203.556.342,00	88	1.298.556.342,00	88	1.373.956.342,00	1.06.0.00.0.00.01.00 - DINAS SOSIAL			
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					25.672.000,00		25.672.000,00		51.563.020,00		51.563.020,00		51.963.020,00				
Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	1	25.672.000,00	1	25.672.000,00	1	51.563.020,00	1	51.563.020,00	1	51.963.020,00				
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					25.672.000,00		25.672.000,00		51.563.020,00		51.563.020,00		51.963.020,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	1	25.672.000,00	1	25.672.000,00	1	51.563.020,00	1	51.563.020,00	1	51.963.020,00				
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					1.063.677.814,00		1.126.993.322,00		1.151.993.322,00		1.246.993.322,00		1.321.993.322,00				
Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	0	0	97	1.063.677.814,00	97	1.126.993.322,00	98	1.151.993.322,00	98	1.246.993.322,00	99	1.321.993.322,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	5		5		6		6		6					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	22	22	22		22		22		22		22					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0		0		1		1		0					
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					233.140.000,00		233.140.000,00		233.140.000,00		233.140.000,00		233.140.000,00			KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	5	233.140.000,00	5	233.140.000,00	6	233.140.000,00	6	233.140.000,00	6	233.140.000,00				
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					348.050.000,00		358.050.000,00		358.050.000,00		408.050.000,00		358.050.000,00			KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	22	22	22	348.050.000,00	22	358.050.000,00	22	358.050.000,00	22	408.050.000,00	22	358.050.000,00				
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					93.940.000,00		236.679.020,00		193.940.000,00		293.940.000,00		193.940.000,00			KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	20	20	93.940.000,00	20	236.679.020,00	20	193.940.000,00	27	293.940.000,00	27	193.940.000,00				
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					304.685.996,00		224.775.000,00		124.775.000,00		363.381.575,00		246.852.498,00			KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	304.685.996,00	1	224.775.000,00	3	124.775.000,00	0	363.381.575,00	1	246.852.498,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	0		1		1		0		0					
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KOTA PEKANBARU	
Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					362.524.180,00		376.524.180,00		382.524.180,00		432.524.180,00		482.524.180,00			KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	362.524.180,00	1	376.524.180,00	1	382.524.180,00	1	432.524.180,00	1	482.524.180,00				
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	0	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.233.554.780,00		1.233.554.780,00		1.433.554.780,00		1.433.554.780,00		1.433.554.780,00			KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1.233.554.780,00	1	1.233.554.780,00	1	1.433.554.780,00	1	1.433.554.780,00	1	1.433.554.780,00				
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					979.815.996,00		1.052.644.020,00		1.159.905.000,00		1.298.511.575,00		1.031.982.498,00				
Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	20	20	979.815.996,00	20	1.052.644.020,00	20	1.159.905.000,00	27	1.298.511.575,00	27	1.031.982.498,00				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		1		3		0		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	3	0		1		0		0		0					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	2	0		0		1		0		0					
1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	3	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	2	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					9.405.700,00		109.405.700,00		189.405.700,00		159.405.700,00		229.227.584,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	5	9.405.700,00	5	109.405.700,00	5	189.405.700,00	5	159.405.700,00	5	229.227.584,00				
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.695.300,00		95.695.300,00		145.695.300,00		245.695.300,00		245.695.300,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	5	5	45.695.300,00	5	95.695.300,00	5	145.695.300,00	5	245.695.300,00	5	245.695.300,00				
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					38.400.000,00		38.400.000,00		357.973.552,00		188.400.000,00		188.400.000,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	1	1	38.400.000,00	1	38.400.000,00	1	357.973.552,00	1	188.400.000,00	1	188.400.000,00				
1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		0,00		150.000.000,00		Sukajadi		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	0,00	1	150.000.000,00				
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.596.078.960,00		1.610.078.960,00		1.816.078.960,00		1.866.078.960,00		1.916.078.960,00				
Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	0	1.596.078.960,00	0	1.610.078.960,00	0	1.816.078.960,00	0	1.866.078.960,00	0	1.916.078.960,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	112.220.020,00	1	166.481.000,00	1	216.481.000,00	1	316.481.000,00	1	316.481.000,00				
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.800.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00				
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					401.704.811,00		501.704.811,00		401.704.811,00		526.463.578,00		666.338.760,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	70	70	401.704.811,00	70	501.704.811,00	70	401.704.811,00	70	526.463.578,00	70	666.338.760,00				
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					123.430.080,00		124.430.080,00		125.430.080,00		125.430.080,00		196.195.900,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	2	123.430.080,00	2	124.430.080,00	2	125.430.080,00	2	125.430.080,00	2	196.195.900,00				
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					7.500.000,00		7.500.000,00		45.000.000,00		57.500.000,00		90.000.000,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	45.000.000,00	1	57.500.000,00	1	90.000.000,00				
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93.501.000,00		393.501.000,00		843.074.552,00		593.501.000,00		813.322.884,00				
Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	5	5	93.501.000,00	5	393.501.000,00	5	843.074.552,00	5	593.501.000,00	5	813.322.884,00				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	5		5		5		5		5					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	1.006.802.531,00	1	1.186.063.511,00	1	1.224.563.511,00	1	1.465.822.278,00	1	1.699.963.280,00				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	70	70		70		70		70		70					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	3		3		3		3		3					
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					45.211.910,00		45.211.910,00		45.211.910,00		47.211.910,00		47.211.910,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	45.211.910,00	1	45.211.910,00	1	45.211.910,00	1	47.211.910,00	1	47.211.910,00				
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.052.660,00		5.052.660,00		5.052.660,00		7.052.660,00		8.052.660,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	5.052.660,00	1	5.052.660,00	1	5.052.660,00	1	7.052.660,00	1	8.052.660,00				
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					300.883.050,00		324.883.050,00		374.883.050,00		374.883.050,00		374.883.050,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	3	300.883.050,00	3	324.883.050,00	3	374.883.050,00	3	374.883.050,00	3	374.883.050,00				
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					112.220.020,00		166.481.000,00		216.481.000,00		316.481.000,00		316.481.000,00		KOTA PEKANBARU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	4.378.790,00	1	5.378.790,00	1	6.378.790,00	1	7.378.790,00	1	8.378.790,00				
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00				
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	5	50.000.000,00	0	100.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	300.000.000,00				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0		0		0		0							
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1		1		2		2							
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0		0		0		0							
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	0,00	1	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00				
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	5	50.000.000,00	0	0,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	150.000.000,00				
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.006.802.531,00		1.186.063.511,00		1.224.563.511,00		1.465.822.278,00		1.699.963.280,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	1.006.802.531,00	1	1.186.063.511,00	1	1.224.563.511,00	1	1.465.822.278,00	1	1.699.963.280,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	70	70		70		70		70		70				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	3		3		3		3		3				
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					45.211.910,00		45.211.910,00		45.211.910,00		47.211.910,00		47.211.910,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	45.211.910,00	1	45.211.910,00	1	45.211.910,00	1	47.211.910,00	1	47.211.910,00			
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.052.660,00		5.052.660,00		5.052.660,00		7.052.660,00		8.052.660,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	5.052.660,00	1	5.052.660,00	1	5.052.660,00	1	7.052.660,00	1	8.052.660,00			
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					300.883.050,00		324.883.050,00		374.883.050,00		374.883.050,00		374.883.050,00		KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	3	300.883.050,00	3	324.883.050,00	3	374.883.050,00	3	374.883.050,00	3	374.883.050,00			
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					112.220.020,00		166.481.000,00		216.481.000,00		316.481.000,00		316.481.000,00		KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	112.220.020,00	1	166.481.000,00	1	216.481.000,00	1	316.481.000,00	1	316.481.000,00				
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.800.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00				
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					401.704.811,00		501.704.811,00		401.704.811,00		526.463.578,00		656.338.760,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	70	70	401.704.811,00	70	501.704.811,00	70	401.704.811,00	70	526.463.578,00	70	656.338.760,00				
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					123.430.080,00		124.430.080,00		125.430.080,00		125.430.080,00		196.195.900,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	2	123.430.080,00	2	124.430.080,00	2	125.430.080,00	2	125.430.080,00	2	196.195.900,00				
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					7.500.000,00		7.500.000,00		45.000.000,00		57.500.000,00		90.000.000,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	45.000.000,00	1	57.500.000,00	1	90.000.000,00				
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93.501.000,00		393.501.000,00		843.074.552,00		593.501.000,00		813.322.884,00				
Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	5	5	93.501.000,00	5	393.501.000,00	5	843.074.552,00	5	593.501.000,00	5	813.322.884,00				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1		1		1		1							
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	1	1		1		1		1							
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	5		5		5		5							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	3	0		1		0		0		0					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	2	0		0		1		0		0					
1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	3	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	2	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					9.405.700,00		109.405.700,00		189.405.700,00		159.405.700,00		229.227.584,00				KOTA PEKANBARU
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	5	9.405.700,00	5	109.405.700,00	5	189.405.700,00	5	159.405.700,00	5	229.227.584,00				
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.695.300,00		95.695.300,00		145.695.300,00		245.695.300,00		245.695.300,00				KOTA PEKANBARU
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	5	5	45.695.300,00	5	95.695.300,00	5	145.695.300,00	5	245.695.300,00	5	245.695.300,00				
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					38.400.000,00		38.400.000,00		357.973.552,00		188.400.000,00		188.400.000,00				KOTA PEKANBARU
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	1	1	38.400.000,00	1	38.400.000,00	1	357.973.552,00	1	188.400.000,00	1	188.400.000,00				
1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		0,00		150.000.000,00				Sukajadi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	0,00	1	150.000.000,00				
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.596.078.960,00		1.610.078.960,00		1.816.078.960,00		1.866.078.960,00		1.916.078.960,00				
Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	0	1.596.078.960,00	0	1.610.078.960,00	0	1.816.078.960,00	0	1.866.078.960,00	0	1.916.078.960,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	0		1		1		0		0					
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					362.524.180,00		376.524.180,00		382.524.180,00		432.524.180,00		482.524.180,00				KOTA PEKANBARU
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	362.524.180,00	1	376.524.180,00	1	382.524.180,00	1	432.524.180,00	1	482.524.180,00				
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	0	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.233.554.780,00		1.233.554.780,00		1.433.554.780,00		1.433.554.780,00		1.433.554.780,00				KOTA PEKANBARU
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1.233.554.780,00	1	1.233.554.780,00	1	1.433.554.780,00	1	1.433.554.780,00	1	1.433.554.780,00				
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					979.815.996,00		1.052.644.020,00		1.159.905.000,00		1.298.511.575,00		1.031.982.498,00				
Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	20	20	979.815.996,00	20	1.052.644.020,00	20	1.159.905.000,00	27	1.298.511.575,00	27	1.031.982.498,00				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		1		3		0		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	5		5		6		6		6					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	22	22	22		22		22		22		22					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0		0		1		1		0					
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					233.140.000,00		233.140.000,00		233.140.000,00		233.140.000,00		233.140.000,00			KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	5	233.140.000,00	5	233.140.000,00	6	233.140.000,00	6	233.140.000,00	6	233.140.000,00				
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					348.050.000,00		358.050.000,00		358.050.000,00		408.050.000,00		358.050.000,00			KOTA PEKANBARU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	22	22	22	348.050.000,00	22	358.050.000,00	22	358.050.000,00	22	408.050.000,00	22	358.050.000,00				
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					93.940.000,00		236.679.020,00		193.940.000,00		293.940.000,00		193.940.000,00			KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	20	20	93.940.000,00	20	236.679.020,00	20	193.940.000,00	27	293.940.000,00	27	193.940.000,00				
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					304.685.996,00		224.775.000,00		124.775.000,00		363.381.575,00		246.852.498,00			KOTA PEKANBARU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	304.685.996,00	1	224.775.000,00	3	124.775.000,00	0	363.381.575,00	1	246.852.498,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		250.000.000,00		0,00		0,00				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00	1	0,00	0	0,00				
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.089.349.814,00		1.152.665.322,00		1.203.556.342,00		1.298.556.342,00		1.373.956.342,00				
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	84	85	86	1.089.349.814,00	87	1.152.665.322,00	87	1.203.556.342,00	88	1.298.556.342,00	88	1.373.956.342,00	1.06.0.00.0.00.01.00.00 - DINAS SOSIAL			
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					25.672.000,00		25.672.000,00		51.563.020,00		51.563.020,00		51.963.020,00				
Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	1	25.672.000,00	1	25.672.000,00	1	51.563.020,00	1	51.563.020,00	1	51.963.020,00				
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					25.672.000,00		25.672.000,00		51.563.020,00		51.563.020,00		51.963.020,00				
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	1	25.672.000,00	1	25.672.000,00	1	51.563.020,00	1	51.563.020,00	1	51.963.020,00				
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					1.063.677.814,00		1.126.993.322,00		1.151.993.322,00		1.246.993.322,00		1.321.993.322,00				
Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	0	0	97	1.063.677.814,00	97	1.126.993.322,00	98	1.151.993.322,00	98	1.246.993.322,00	99	1.321.993.322,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	10		10		10		10		10					
	Jumlah Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)			115		117		120		122		125					
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	50	50		55		60		65		70					
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20	25	30		35		40		45		50					
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					218.777.780,00		228.777.780,00		253.777.780,00		278.777.780,00		303.777.780,00			KOTA PEKANBARU	
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	50	50	218.777.780,00	55	228.777.780,00	60	253.777.780,00	65	278.777.780,00	70	303.777.780,00				
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					277.876.840,00		287.876.840,00		307.876.840,00		337.876.840,00		367.876.840,00			KOTA PEKANBARU	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20	25	30	277.876.840,00	35	287.876.840,00	40	307.876.840,00	45	337.876.840,00	50	367.876.840,00				
1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan					252.224.792,00		282.540.300,00		282.540.300,00		302.540.300,00		302.540.300,00			KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	0	0	97	252.224.792,00	97	282.540.300,00	98	282.540.300,00	98	302.540.300,00	99	302.540.300,00				
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					18.356.400,00		18.356.400,00		20.356.400,00		20.356.400,00		20.356.400,00		Sukajadi		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	10	18.356.400,00	10	18.356.400,00	10	20.356.400,00	10	20.356.400,00	10	20.356.400,00				
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					296.442.002,00		309.442.002,00		287.442.002,00		307.442.002,00		327.442.002,00		KOTA PEKANBARU		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)			115	296.442.002,00	117	309.442.002,00	120	287.442.002,00	122	307.442.002,00	125	327.442.002,00				
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	0,00	100	0,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL			
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	5	0,00	5	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00				
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KOTA PEKANBARU		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	5	0,00	5	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00				
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					872.515.423,00		1.359.454.602,00		1.612.015.758,00		2.044.557.777,00		2.296.557.777,00				
meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dasar (%)	100	100	100	872.515.423,00	100	1.359.454.602,00	100	1.612.015.758,00	100	2.044.557.777,00	100	2.296.557.777,00	1.06.0.00.0.00.01.00.00 - DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					775.700.073,00		1.262.639.252,00		1.415.158.054,00		1.747.700.073,00		1.897.700.073,00				
Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	775.700.073,00	450	1.262.639.252,00	450	1.415.158.054,00	450	1.747.700.073,00	450	1.897.700.073,00				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50		50		50		50		50					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25		25		25		25		25					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450		450		450		450		450					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450		450		450		450		450					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50		50		50		50		50					
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450		450		450		450		450					
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15		15		15		15		15					
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50		50		50		50		50					
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25		25		25		25		25					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50		50		50		50		50					
	Jumlah Orang yang Menerima Paksaan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450		450		450		450		450					
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan					90.350.600,00		188.350.600,00		133.808.581,00		208.350.600,00		258.350.600,00		KOTA PEKANBARU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terpenuhinya Kebutuhan Pemakaian Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaian Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	90.350.600,00	450	188.350.600,00	450	133.808.581,00	450	208.350.600,00	450	258.350.600,00				
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang					88.742.770,00		145.742.770,00		185.742.770,00		185.742.770,00		185.742.770,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Paksi dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Paksi dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	88.742.770,00	450	145.742.770,00	450	185.742.770,00	450	185.742.770,00	450	185.742.770,00				
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu					99.727.083,00		199.727.083,00		119.727.083,00		119.727.083,00		169.727.083,00		KOTA PEKANBARU		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50	99.727.083,00	50	199.727.083,00	50	119.727.083,00	50	119.727.083,00	50	169.727.083,00				
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					76.561.510,00		83.561.510,00		120.561.510,00		173.561.510,00		173.561.510,00		KOTA PEKANBARU		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50	76.561.510,00	50	83.561.510,00	50	120.561.510,00	50	173.561.510,00	50	173.561.510,00				
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					155.638.140,00		165.638.140,00		165.638.140,00		195.638.140,00		195.638.140,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50	155.638.140,00	50	165.638.140,00	50	165.638.140,00	50	195.638.140,00	50	195.638.140,00				
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					55.075.220,00		85.075.220,00		105.075.220,00		135.075.220,00		135.075.220,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25	55.075.220,00	25	85.075.220,00	25	105.075.220,00	25	135.075.220,00	25	135.075.220,00				
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					24.518.460,00		49.457.639,00		74.518.460,00		94.518.460,00		124.518.460,00		KOTA PEKANBARU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50	24.518.460,00	50	49.457.639,00	50	74.518.460,00	50	94.518.460,00	50	124.518.460,00				
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					60.200.000,00		90.200.000,00		160.200.000,00		160.200.000,00		160.200.000,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	60.200.000,00	450	90.200.000,00	450	160.200.000,00	450	160.200.000,00	450	160.200.000,00				
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan					35.356.200,00		75.356.200,00		95.356.200,00		135.356.200,00		135.356.200,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	35.356.200,00	450	75.356.200,00	450	95.356.200,00	450	135.356.200,00	450	135.356.200,00				
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					44.656.500,00		64.656.500,00		94.656.500,00		144.656.500,00		144.656.500,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25	44.656.500,00	25	64.656.500,00	25	94.656.500,00	25	144.656.500,00	25	144.656.500,00				
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan					25.627.070,00		75.627.070,00		100.627.070,00		125.627.070,00		145.627.070,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	450	450	25.627.070,00	450	75.627.070,00	450	100.627.070,00	450	125.627.070,00	450	145.627.070,00				
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota					19.246.520,00		39.246.520,00		59.246.520,00		69.246.520,00		69.246.520,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15	19.246.520,00	15	39.246.520,00	15	59.246.520,00	15	69.246.520,00	15	69.246.520,00				
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial					96.815.350,00		96.815.350,00		196.857.704,00		296.857.704,00		398.857.704,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diuar Panti Sosial dalam 1 tahun	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	96.815.350,00	0	96.815.350,00	0	196.857.704,00	0	296.857.704,00	0	398.857.704,00				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	0		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		100		150		200					
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	0		0		0		0		0					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300		0		0		0		0					
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					0,00		0,00		100.042.354,00		150.042.354,00		202.042.354,00				KOTA PEKANBARU
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	100	100.042.354,00	150	150.042.354,00	200	202.042.354,00				
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Pemakanan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU
Terpenuhiya Kebutuhan Pemakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KOTA PEKANBARU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KOTA PEKANBARU
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KOTA PEKANBARU
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KOTA PEKANBARU
Terperuhnya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KOTA PEKANBARU
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KOTA PEKANBARU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KOTA PEKANBARU		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	300	300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					96.815.350,00		96.815.350,00		96.815.350,00		146.815.350,00		196.815.350,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	96.815.350,00	1	96.815.350,00	1	96.815.350,00	1	146.815.350,00	1	196.815.350,00				
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					6.596.242.127,00		5.766.578.950,00		5.338.578.950,00		5.393.578.950,00		5.598.578.950,00				
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	88	89	90	6.596.242.127,00	90	5.766.578.950,00	90	5.338.578.950,00	90	5.393.578.950,00	90	5.598.578.950,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL			
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					92.485.780,00		95.485.780,00		142.485.780,00		192.485.780,00		392.485.780,00				
Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15	92.485.780,00	15	95.485.780,00	15	142.485.780,00	15	192.485.780,00	15	392.485.780,00				
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	15		15		15		15		15					
	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15		15		15		15		15					
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					22.632.920,00		22.632.920,00		22.632.920,00		22.632.920,00		122.632.920,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	15	22.632.920,00	15	22.632.920,00	15	22.632.920,00	15	22.632.920,00	15	122.632.920,00				
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar					57.444.250,00		60.444.250,00		107.444.250,00		107.444.250,00		107.444.250,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15	57.444.250,00	15	60.444.250,00	15	107.444.250,00	15	107.444.250,00	15	107.444.250,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar					12.408.610,00		12.408.610,00		12.408.610,00		62.408.610,00		162.408.610,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15	12.408.610,00	15	12.408.610,00	15	12.408.610,00	15	62.408.610,00	15	162.408.610,00				
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					6.503.756.347,00		5.671.093.170,00		5.196.093.170,00		5.201.093.170,00		5.206.093.170,00				
Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	800	800	800	6.503.756.347,00	13.971	5.671.093.170,00	13.971	5.196.093.170,00	13.971	5.201.093.170,00	13.971	5.206.093.170,00				
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	235.230	235.230	235.230		235.240		235.250		235.260		235.270					
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	250	250		255		260		265		270					
	Jumlah Usulan Perindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	100	100	100		110		120		130		140					
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					310.783.800,00		320.783.800,00		320.783.800,00		320.783.800,00		320.783.800,00		KOTA PEKANBARU		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	235.230	235.230	235.230	310.783.800,00	235.240	320.783.800,00	235.250	320.783.800,00	235.260	320.783.800,00	235.270	320.783.800,00				
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					583.397.848,00		590.396.300,00		590.396.300,00		590.396.300,00		590.396.300,00		KOTA PEKANBARU		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	250	250	583.397.848,00	255	590.396.300,00	260	590.396.300,00	265	590.396.300,00	270	590.396.300,00				
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					5.172.692.699,00		4.403.030.270,00		4.023.030.270,00		4.023.030.270,00		4.023.030.270,00		KOTA PEKANBARU		
Terpenuhi Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	800	800	800	5.172.692.699,00	13.971	4.403.030.270,00	13.971	4.023.030.270,00	13.971	4.023.030.270,00	13.971	4.023.030.270,00				
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					436.882.000,00		356.882.800,00		261.882.800,00		266.882.800,00		271.882.800,00		KOTA PEKANBARU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Perindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	100	100	100	436.882.000,00	110	356.882.800,00	120	261.882.800,00	130	266.882.800,00	140	271.882.800,00				
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.068.258.444,00		1.429.358.841,00		1.230.458.841,00		1.309.458.841,00		1.316.458.841,00				
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	1.068.258.444,00	100	1.429.358.841,00	100	1.230.458.841,00	100	1.309.458.841,00	100	1.316.458.841,00	1.06.0.00.0.00.01.00 - DINAS SOSIAL			
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					627.346.834,00		965.447.231,00		880.447.231,00		958.447.231,00		962.447.231,00				
Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700	700	700	627.346.834,00	700	965.447.231,00	700	880.447.231,00	700	958.447.231,00	700	962.447.231,00				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700	700	700		700		700		700		700					
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	300		300		300		300		300					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	300		300		300		300		300					
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15		15		15		15		15					
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan					400.932.680,00		488.933.680,00		488.933.680,00		562.933.680,00		562.933.680,00			KOTA PEKANBARU	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700	700	700	400.932.680,00	700	488.933.680,00	700	488.933.680,00	700	562.933.680,00	700	562.933.680,00				
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang					100.972.840,00		130.972.840,00		100.972.840,00		100.972.840,00		100.972.840,00			KOTA PEKANBARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700	700	700	100.972.840,00	700	130.972.840,00	700	100.972.840,00	700	100.972.840,00	700	100.972.840,00				
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					12.590.640,00		15.190.040,00		17.190.040,00		19.190.040,00		21.190.040,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	300	12.590.640,00	300	15.190.040,00	300	17.190.040,00	300	19.190.040,00	300	21.190.040,00				
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial					12.434.540,00		15.934.540,00		17.934.540,00		19.934.540,00		21.934.540,00		KOTA PEKANBARU		
Terperuhnya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	300	12.434.540,00	300	15.934.540,00	300	17.934.540,00	300	19.934.540,00	300	21.934.540,00				
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					100.416.134,00		314.416.131,00		255.416.131,00		255.416.131,00		255.416.131,00		KOTA PEKANBARU		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	15	100.416.134,00	15	314.416.131,00	15	255.416.131,00	15	255.416.131,00	15	255.416.131,00				
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					440.911.610,00		463.911.610,00		350.011.610,00		351.011.610,00		354.011.610,00				
Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	159	159	159	440.911.610,00	159	463.911.610,00	159	350.011.610,00	159	351.011.610,00	159	354.011.610,00				
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1	1		1		1		1		1					
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					90.084.010,00		93.084.010,00		54.084.010,00		55.084.010,00		58.084.010,00		KOTA PEKANBARU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1	1	90.084.010,00	1	93.084.010,00	1	54.084.010,00	1	55.084.010,00	1	58.084.010,00				
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					350.827.600,00		370.827.600,00		295.927.600,00		295.927.600,00		295.927.600,00		KOTA PEKANBARU		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	159	159	159	350.827.600,00	159	370.827.600,00	159	295.927.600,00	159	295.927.600,00	159	295.927.600,00				

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.4.

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL				
1.	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
3.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	meningkatnya rehabilitasi sosial	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Pemakanan 1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang 1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu 1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan 1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan 1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan 1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Pemakanan 1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang 1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu 1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			1.06.04.2.02.0010 - Pembedaan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
4.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Pada Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.5

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	68,32	69,38	71,25	72,33	73,35	74,5	
3.	Persentase penduduk miskin	%	3,15	2,89	2,685	2,48	2,28	2,085	1,89	
4.	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase PSKS yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	79,32	83,5	84	84,5	85	85,5	86	
8.	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,55	63,50	65,00	66,50	68,00	69,50	71,50	

Tabel 4.6 Tujuan dan Sasaran
TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL												
- Terwujudnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin - Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0	68,32	69,38	71,25	72,33	73,35	74,5		
			Persentase penduduk miskin (%)	3,15	2,89	2,685	2,48	2,28	2,085	1,89		
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan PPKS dan Pemberdayaan PSKS		Persentase PSKS yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100	100	100	100	100		
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100		
	Meningkatnya Penanganan Bencana		Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial yang prima dan akuntable		Nilai IKM Perangkat Daerah (Nilai)	79,32	83,5	84	84,5	85	85,5	86		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	62,55	63,5	65	66,5	68	69,5	71,5		

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.6

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Pekanbaru.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman arah kebijakan, strategi, program, serta kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan berlandaskan pada visi Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu “Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera”, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 dan kebijakan nasional di bidang sosial.

Penyusunan Renstra ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan pelayanan sosial yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil (*result-based management*). Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan administratif, tetapi juga menjadi arah moral dan strategis bagi seluruh jajaran Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan yang adil, inklusif, serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Selama periode pelaksanaan 2025-2029, fokus pembangunan sosial diarahkan pada empat pilar utama, yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Melalui keempat pilar tersebut, Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial keluarga, serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra ini telah disusun secara terukur dengan memperhatikan kebutuhan lokal, potensi sumber daya sosial, serta arah kebijakan pemerintah daerah dan pusat

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam mendukung penyelenggaraan program-program sosial yang berkeadilan dan berdaya guna. Dengan adanya kerja sama yang kuat dan berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru dapat semakin efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan sistem pelayanan sosial yang adaptif terhadap tantangan zaman, berbasis data yang akurat, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan semangat kolaborasi, integritas, dan profesionalisme, seluruh jajaran Dinas Sosial berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya masyarakat Pekanbaru yang berdaya, berkarakter, dan sejahtera sosial.

Demikian dokumen Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman kerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Semoga dengan izin Allah SWT, seluruh rencana dan program yang telah dirumuskan dapat terlaksana dengan baik, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta menjadi bagian penting dari terwujudnya Pekanbaru sebagai kota yang berbudaya, maju, dan sejahtera.

Pekanbaru, Oktober 2025

KERALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU



ZULFANMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001